



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: <i>Courtesy Call</i>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 21 April 2022
Waktu	: Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat	: Gedung Nusantara III Lantai 2
Acara	: 1. Pertemuan dengan Duta Besar Swedia H.E. Mr Marina Berg; 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Dr. Fadli Zon / Ketua BKSAP DPR RI (F-PGerindra/A-86)
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si/ Kepala Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral
Hadir	: 1. Putu Supadma Rudana/ Wakil Ketua BKSAP DPR RI (F-PD/A-563); 2. Dr. H. Mardani Ali Sera, M. Eng/ Wakil Ketua BKSAP (F.PKS/A-422); 3. H.E. Ms. Marina Berg/ Duta Besar Swedia untuk Indonesia; 4. Mr. Gustav Dahlin/ <i>Deputy Head of Mission</i> Kedutaan Besar Swedia; 5. Tenaga Ahli BKSAP; 6. Sekretariat KSB Biro KSAP.

I. Pendahuluan

Dr. Fadli Zon/ Ketua BKSAP DPR RI (F-PGerindra/A-86) menerima kedatangan Duta Besar Swedia, H.E. Ms. Marina Berg pada pukul 13.25 WIB dan pertemuan terbuka untuk umum.

II. Kesimpulan / Keputusan:

1. Ketua BKSAP menyampaikan terima kasih atas kedatangan Duta Besar Swedia untuk Indonesia ke Gedung DPR RI ditengah situasi saat ini. Pertemuan membahas berbagai hal terkait upaya meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Swedia. Ketua juga turut menyampaikan rencana kunjungan diplomasi BKSAP ke Stockholm yang akan terlaksana dalam waktu dekat.
2. Hubungan diplomatik Indonesia-Swedia yang sudah terjalin sejak 1950 menjadi salah satu *focal point* diplomasi parlemen Indonesia dijalankan oleh DPR RI. Meski terpisah jarak yang cukup jauh, kerjasama bilateral antar kedua negara selalu berjalan dengan produktif, terutama dalam sektor perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, lingkungan, *sustainable energy*, dan sektor transportasi.
3. Indonesia dan Swedia sama-sama memegang teguh semangat demokrasi yang mengedepankan sikap saling menghormati dalam kehidupan sosial dan budaya. Ketua BKSAP berharap kedua negara dapat saling menjaga dan memperkuat upaya dan *political will* untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan membuka dialog mengenai Islam moderat yang saling menghargai dan toleransi terhadap hak-hak asasi dalam kehidupan politik dan sosial. Untuk itu, Parlemen Indonesia mengharapkan kerja sama di bidang pendidikan di Swedia dapat ditingkatkan.
4. Terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Ketua BKSAP menyatakan bahwa peran parlemen sangat krusial dalam mendorong pembangunan dan terpenuhinya setiap aspek tujuan bagi masyarakat. Parlemen Indonesia sendiri telah menyelenggarakan berbagai forum internasional dan menjadi tuan rumah bagi pembahasan SDGs tingkat dunia, salah satunya melalui menjadi tuan rumah *The First Global Parliamentary Conference on Achieving The SDGs* dan menjadi inisiator *The World Parliamentary Forum on Sustainable Development*.
5. Tidak hanya itu, pada bulan Maret lalu, DPR RI juga telah berhasil menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang IPU ke 144 di Nusa Dua, Bali yang menghasilkan Deklarasi Nusa Dua yang berjudul "*Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change*" yang memperkuat komitmen parlemen dalam menghadapi perubahan iklim, khususnya melalui kerangka kerjasama multilateral.
6. Duta Besar Swedia menyampaikan apresiasi atas hubungan diplomatik yang telah lebih dari 70 tahun terjalin antara Swedia-Indonesia. Saat ini, Indonesia dan Swedia telah menyepakati kerja sama dalam beberapa bidang dalam

Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP). Kerja sama tersebut menepakati kerja sama dalam lima bidang yakni Pembangunan Berkelanjutan dan Penciptaan Lapangan Kerja, Transportasi Cerdas, Energi Terbarukan, Ekonomi Biru, dan Industri 4.0.

7. Dalam SISP 2021, Indonesia dan Swedia akan berdiskusi lebih lanjut untuk menemukan solusi berkelanjutan dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Indonesia dan Swedia, bersama dengan 191 negara lainnya, telah berjanji untuk mencapai TPB. Tujuan Ini harus dicapai untuk mengakhiri kemiskinan, menjaga lingkungan, dan memastikan bahwa pada 2030 semua orang bisa menikmati perdamaian dan kemakmuran.
8. Hubungan bilateral Swedia-Indonesia juga telah diperdalam di beberapa bidang, termasuk energi, transportasi, dan pendidikan. Nota Kesepakatan (MoU) dari ketiga sektor ini ditandatangani pada 2017. Model bisnis perusahaan Swedia harus didasarkan pada pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini juga dilakukan dalam kerja sama Indonesia-Swedia.
9. Terkait demokrasi, Dubes Swedia menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu partner penting bagi Swedia, yang secara aktif mempromosikan inisiatif kebijakan luar negeri bertajuk "*Drive for Democracy*". Sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, Indonesia tentu telah berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan demokrasi di dalam negeri.
10. Terkait sustainable energi, Swedia sudah memiliki *Sustainable Energy Agency* yang saat ini sudah bekerja sama dengan sejumlah *counterparts* di Indonesia. Saat ini, Swedia juga sedang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam hal elektrifikasi-transportasi umum, khususnya terkait Trans-Jakarta.
11. Dubes Swedia optimis bahwa kedua parlemen bisa menjalin kerja sama terkait isu demokrasi, diantaranya terkait bagaimana konstitusi dibentuk di Swedia dan terkait metode kerja yang berjalan di Parlemen Swedia. Misalnya ditengah pandemi, dimana semua anggota parlemen tidak bisa bertatap muka dan harus bekerja dirumah padahal banyak sekali regulasi yang harus diperbaharui sebab terdampak dengan pandemi. Setiap harinya, perlu ada keputusan cepat, tepat dan bijaksana bagi parlemen ditengah situasi global, seperti situasi yang terjadi ditengah konflik di Eropa saat ini.
12. Untuk saat ini, situasi pandemi di Swedia sudah tertangani dengan baik, bahkan pemerintah tidak pernah memberlakukan pembatasan social atau *lockdown* tetapi hanya memberlakukan penerapan protokol yang ketat.

13. *Deputy Head of Mission* Kedutaan Besar Swedia juga menyampaikan bahwa kerja sama *parliament-to-parliament* dinilai tidak kalah penting untuk dilakukan bagi setiap negara, mengingat selama ini kerjasama antar negara hanya berfokus pada kerja sama *business-to-business* dan *government-to-government* padahal parlemen sangat berpengaruh dalam pembentukan regulasi.

III. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 14.05 WIB.

Jakarta, 21 April 2022
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.
NIP. 197206221999032001